

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HOTEL ANTARA PENGUSAHA DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
Muhammad Al Hafidz

Perpajakan adalah perjanjian yang berdasarkan hukum. Karena pajak diperlukan oleh negara untuk mendanai operasi pemerintah negara bagian, maka dibuatlah perjanjian antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pajak yang sebenarnya terdiri dari pungutan pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pusat-yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai-dikenakan oleh pemerintah pusat pada PBB pedesaan dan perkotaan. Mereka percaya bahwa meskipun mereka telah membayar untuk pajak mereka, mereka tidak menyadari adanya keuntungan atau manfaat dari pemerintah. Selain itu, penggunaan pajak oleh pemerintah dianggap tidak transparan. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dimana penelitian dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum yang ada di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini maupun yang telah diubah. Sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dituangkan melalui bahan kepustakaan, tertentu dengan wawancara yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif serta dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pemilik hotel dan pemerintah daerah Bandar Lampung menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi. Terdapat hambatan eksternal dan internal yang membuat penyelesaian sengketa pajak menjadi sulit. Untuk menjaga keadilan pemungutan pajak, sengketa pajak hotel harus diselesaikan. Jika ditangani dengan benar, prosedurnya dapat diselesaikan dengan cepat, menguntungkan semua pihak, dan sesuai dengan persyaratan hukum.

**Kata Kunci: Sengketa Pajak, Mediasi, dan Kebijakan**

## ABSTRACT

### SETTLEMENT OF HOTEL TAX DISPUTES BETWEEN ENTREPRENEURS AND BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT

By

Muhammad Al Hafidz

*Taxation is an agreement based on law. Since taxes are required by the state to fund the operations of the state government, an agreement is made between the President and the House of Representatives. Actual taxes consist of central and local levies. According to Law No. 28/2009, which regulates local taxes and retributions, central taxes-which include income tax, value-added tax, sales tax on luxury goods, land and building tax, and stamp duty-are imposed by the central government on rural and urban PBBs. They believe that although they have paid for their taxes, they do not realize any benefits from the government. In addition, the use of taxes by the government is perceived to be non-transparent. One of the methods used in this research is a normative-empirical approach, where research is conducted by paying attention to the legal system that exists in the current and amended laws and regulations. The nature of descriptive research that uses primary and secondary data sources as outlined through literature materials, certain interviews as outlined in the form of qualitative analysis as well as documents, books, and laws and regulations. The findings show that hotel owners and the Bandar Lampung local government resolve their problems through mediation. There are external and internal obstacles that make resolving tax disputes difficult. To maintain the fairness of tax collection, hotel tax disputes must be resolved. If handled properly, the procedure can be resolved quickly, in favor of all parties, and in accordance with legal requirements..*

**Keywords: Tax Dispute, Mediation, and Policy**